



LAPORAN KINERJA

2023

**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKj DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2023 masih tetap memprioritaskan kebijakan belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) bagi masyarakat miskin/kurang mampu serta penanganan dampak ekonomi terutama menjaga dunia usaha tetap hidup harus terus dilakukan.

Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra DPUPRPRKP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2024
KEPALA DINAS

JANTANI ALLST
NIP.19731022 200501 1 00

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur”:
 - Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Persentase ketersediaan infrastruktur , Formulasi Perhitungan :
$$\begin{aligned} & ((\text{Persentase kemantapan jalan}/14) + (\text{Persentase rumah tangga} \\ & \text{yang memiliki akses terhadap air minum layak}/14) + (\text{Persentase} \\ & \text{rumah tangga yang besanitasi}/14) + (\text{Persentasi Pengembangan} \\ & \text{perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi}/14) + \\ & (\text{Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani}/14) + \\ & (\text{Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU}/14) + \\ & (\text{Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara}/14) + \\ & (\text{Persentase Kebutuhan Bangunan Pantai yang terpenuhi}/14) + \\ & (\text{Persentase Kebutuhan Tanggul Sungai yang terpenuhi}/14) + \\ & (\text{Persentase Kebutuhan Polder/Kolam Retensi yang Terpenuhi}/14) \\ & + (\text{Persentase Pemenuhan Kebutuhan air baku}/14) + (\text{Rasio} \\ & \text{Jaringan Irigasi}/14) + (\text{Rasio Ketersediaan Penyelenggaraan Jasa} \\ & \text{Konstruksi}/14) + (\text{Persentase rumah tangga yang terlayani} \\ & \text{pengelolaan sampah}/14)) \end{aligned}$$
 - Capaian indikator (a.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 14 (empat belas) Program, yakni Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Kawasan Permukiman, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional,

Program Peningkatan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum (PSU),
Program Pengembangan Perumahan, Program Penataan Bangunan
Gedung,

- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 18.93 %; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 19.89%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 105.05%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya kualitas dan pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang”:

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang, Formulasi Perhitungan :
$$IP = ((A/B)+(C/D))/2$$

A : Struktur Ruang Termanfaatkan
B : Rencana Struktur Ruang
C : Pola Ruang Termanfaatkan
D : Rencana Pola Ruang
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengadaan Tanah, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 0.6; sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 terealisasi 0.6. Dengan demikian capaian ini sesuai dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Kurangnya ASN dengan background Teknik Sipil dengan kompetensi air minum, sanitasi, dan persampahan.

2. Keterbatasan anggaran untuk melengkapi dokumen perencanaan/readiness criteria (RC).
3. Dokumen perencanaan kebutuhan gedung yang belum ada.
4. Adanya sengketa tanah antar pihak di masyarakat, yang saling mengakui pemilik dari sebidang tanah yang sama, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikannya.
5. Belum menjadi prioritas oleh pemerintah daerah untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran di masyarakat mengenai tata ruang.
6. Integrasi teknologi terkini dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan, seperti sistem manajemen lalu lintas, pemantauan kondisi jalan, dan sistem informasi geografis (GIS) untuk pengelolaan data infrastruktur jalan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	9
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur.....	10
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	12
1.4 Isu-isu Strategis	12
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	12
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	16
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	16
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	17
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2022	17
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	19
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	21
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2022.....	26
3.3. Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	33

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	13
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	14
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023	15
Tabel II.1 Sasaran Strategis PDPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	17
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	17
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023	18
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023	18
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala PD Tahun 2023	19
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2023	22
Tabel III.3 Pengukuran Capaian Sasaran 1	24
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja	25
Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023	27

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur PD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada PD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10
Gambar II.1. Website PD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10
Gambar II.2. Layanan Pengaduan Melalui Website PD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2019*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:
 - a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat ataskinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
 - b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjainstansi.

1.1 *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*

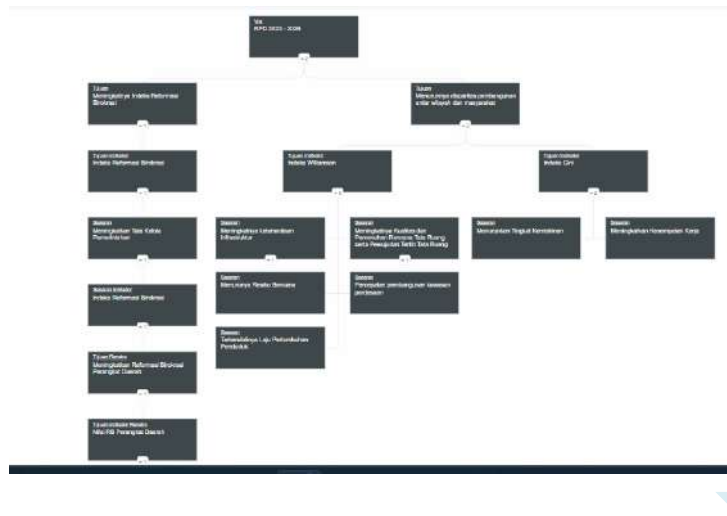
Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan berupa dokumen Rencana strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

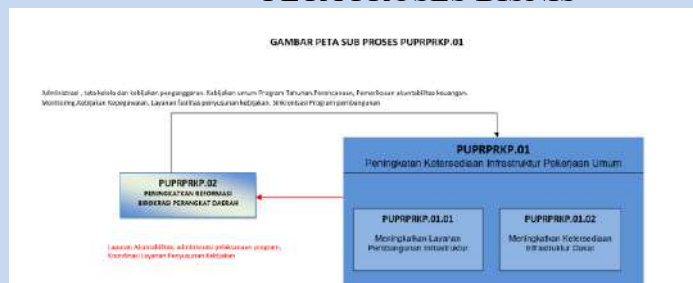


Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
(halaman ini dapat di buat landscape)

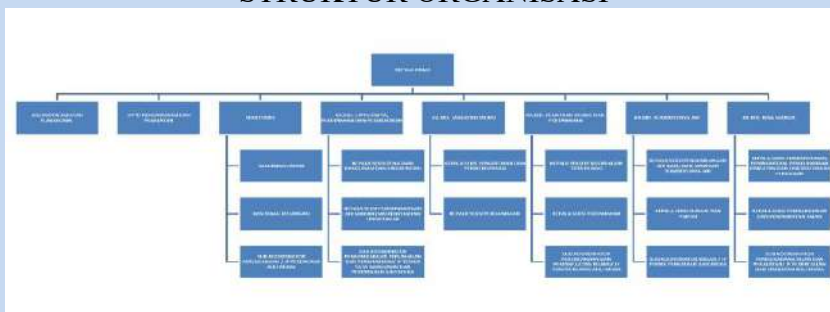
“CASCADING”



“PETA PROSES BISNIS”



“STRUKTUR ORGANISASI”



1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.2.

Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang, bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan bidang pertanahan;
2. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas PUPRPRKP;
4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD.





1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi DPUPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum”, antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kapasitas tampung penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat.
2. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur.
3. Belum tercapainya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran padatahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Esselon,
Golongan dan Pendidikan**

Berdasarkan Esselon

Esselon	Tersedia	Terisi	Kosong
Esselon II	1	1	-
Esselon III	7	7	-
Esselon IV	15	13	2
Sub Koor	5	3	2
Jab. Fungsional	17	17	-
Pelaksana	145	144	-
Jumlah	190	185	4

Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah	Keterangan
Golongan IV	14	IV.c : 1 , IV.b : 4 , IV.a : 9
Golongan III	146	III.d : 46 , III.c : 31 , III.b : 40 , III.a : 29
Golongan II	25	II.d : 19 , II.c : 6
Jumlah	185	

Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Keterangan
S2	28	-
S1/DIV	99	-
DIII	26	-
SLTA	32	-
Jumlah	185	-

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan

Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 99 orang (53.51%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 28 orang (15,13%), D3 sebanyak 26 orang (14.05%), dan SLTA sebanyak 32 orang (17.29%).

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
1	Tanah		229.319.644.760,00
	tanah	132	229.319.644.760,00
2	Peralatan dan mesin		40.189.852.070,32
	alat besar		16.305.734.246,00
	alat angkutan		6.460.496.250,00
	alat bengkel dan alat ukur		2.157.702.553,00
	alat pertanian		49.500.000,00
	alat kantor dan rumah tangga		5.557.143.348,92
	alat studio, komunikasi dan pemancar		248.539.545,00
	alat kedokteran dan kesehatan		-
	alat laboratorium		2.539.843.788,00
	alat persenjataan		3.450.000,00
	komputer		4.201.725.267,40
	alat eksplorasi		-
	alat pengeboran		-
	alat produksi, pengolahan dan pemurnian		-
	alat bantu eksplorasi		-
	alat keselamatan kerja		45.050.767,00
	alat peraga		-
	peralatan proses/produksi		-
	rambu – rambu		2.620.666.305,00
	peralatan olah raga		-
3	Gedung dan bangunan		89.968.271.295,98
	bangunan gedung		88.752.785.295,98
	monumen		240.013.000,00
	bangunan menara		-
	tugu titik kontrol/pasti		975.473.000,00
4	Jalan, irigasi dan jaringan		3.603.445.186.986,98
	jalan dan jembatan	207	3.247.983.639.166,19
	bangunan air	163	325.758.930.477,99

	instalasi	4	2.353.464.532,00
	jaringan	13	27.349.152.810,80
5	Aset tetap lainnya		
	bahan perpustakaan		
	barang bercorak kesenian/kebudayaan/olaha		
	hewan		
	biota perairan		
	tanaman		
	barang koleksi non budaya		
	aset tetap dalam renovasi		
6	Konstruksi dalam pengerjaan	22	17.095.670.700
	konstruksi dalam pengerjaan	22	17.095.670.700
7	dll.		
	Total		376.573.438.826,30

Kendaraan operasional Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan, 12 unit kendaraan operasional, 6 unit kendaraan roda dua dan 10 truck. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadamkebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah
2022	105.495.024.988	160.056.382.449	265.551.407.437
2023	128.886.803.644	264.795.125.769	393.681.929.413

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2023 dibanding tahun 2022 terdapat kenaikan. Total anggaran belanja

sebesar Rp 393.681.929.413,00. Hal ini menunjukkan tidak ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/159/LHE/ITDA/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP PD (AKIP) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala. 2. Melakukan reviu atas laporan kinerja. 3. Informasi dalam laporan kinerja untuk menjadi perhatian utama pimpinan. 4. Untuk membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai standar. 	<p>PD DPUPRPRKP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaiantarget kinerja (output dan outcome) dengan langkah-langkah:</p> <p>Menerima rekomendasi dari Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan akan melakukan pengukuran kinerja secara berkala pada Tahun 2023 dan untuk Tahun 2022 akan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD*

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah :

1. Menurunkan Disparitas Pembangunan antar Wilayah dan Masyarakat.
2. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun sasaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, 2023-2026

(tabel ini dapat di buat landscape)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	-	18,93	32,39	41,80	54,01	54,01	
2.	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	-	0.6	0.7	0.75	0.8	0.8	

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Meningkatkan persentase kemandapan jalan	Meningkatkan persentase kemandapan jalan provinsi
		Meningkatkan Kondisi Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Irigasi untuk Pengendalian Daya Rusak, Konservasi, dan Pendayagunaan SDA	1. Pengendalian daya rusak air 2. Peningkatan Konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air 3. Pembangunan infrastruktur irigasi
		Pengoptimalan Pengelolaan Penyediaan SPAM	Mengoptimalkan Pengelolaan SPAM
		Pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah	Mengembangkan dan mengelola sistem air limbah
		Pengembangan Perumahan	Mengembangkan Perumahan
		Meningkatkan ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	1. Peningkatan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten; 2. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
2.	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Melakukan integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3K) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

2.2. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung tahun 2023 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	1.1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	47.718.101.313	43.629.124.436	(4.088.976.877)
	1.1.1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	16.715.504.200	17.965.261.383	1.249.757.183
	1.1.2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah	31.002.597.11	25.663.863.053	(5.338.734.060)
	1.2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	249.998.500	0	0
	1.2.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	249.998.500	0	0

	Lintas Kabupaten/Kota			
	1.3 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	473.991.619	359.221.619	(114.770.000)
	1.3.1 Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	473.991.619	359.221.619	(114.770.000)
	1.4 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.854.343.719	2.558.248.519	(296.095.200)
	1.4.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	2.854.343.719	2.558.248.519	(296.095.200)
	1.5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	99.981.631	99.981.631	0
	1.5.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	99.981.631	99.981.631	0

	1.6 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	18.725.350.348	23.261.708.108	4.536.357.760
	1.6.1 Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	18.725.350.348	23.261.708.108	4.536.357.760
	1.7 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.556.619.288	2.663.251.527	1.106.632.239
	1.7.1 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.556.619.288	2.663.251.527	1.106.632.239
	1.8 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	166.254.819.099	267.645.307.025	101.390.487.926
	1.8.1 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	166.254.819.099	267.645.307.025	101.390.487.926
	1.9 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	800.998.300	877.797.504	76.799.204
	1.9.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	553.799.100	638.598.800	84.799.700
	1.9.2 Kegiatan Penyelenggaraan	174.199.400	166.198.930	(8.000.470)

	Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			
	1.9.3 Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	72.999.800	72.999.774	(26)
	1.10 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	13.710.405.434	13.364.947.706	(345.457.728)
	1.10.1 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	13.710.405.434	13.364.947.706	(345.457.728)
	1.11 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	9.106.197.700	8.742.366.500	(363.831.200)
	1.11.1 Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	550.000.000	828.132.800	278.132.800
	1.11.2 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan	8.556.197.700	7.914.233.700	(641.964.000)

	Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
	1.13 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.885.909.734	4.233.782.506	347.872.772
	1.13.1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	3.885.909.734	4.233.782.506	347.872.772
Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	2.1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.803.624.000	1.849.603.200	45.979.200
	2.1.1 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	1.054.834.800	1.100.853.800	46.019.000
	2.1.2 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	233.999.700	233.999.700	0
	2.1.3 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	514.789.500	514.749.700	(39.800)

	2.2 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	69.991.300	69.991.300	0
	2.2.1 Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	69.991.300	69.991.300	0
	2.3 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	54.271.500	54.271.500	0
	2.3.1 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	54.271.500	54.271.500	0
	2.4 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	151.994.200	151.994.200	0
	2.4.1 Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	151.994.200	151.994.200	0

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	36.608.449.941 1.556.679.380	35.545.260.558 1.551.220.580	(1.063.189.383) (5.458.800)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		292.689.619.572	393.681.929.413	100.992.309.841

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun
2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	18,93	Triwulan IV	18.93
2.	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	0.6	Triwulan IV	0.6

Pada tahun 2023, DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran Tahun 2023, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Rasio Ketersediaan Infrastruktur	%	18,93	Triwulan IV	18.93
2.	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Pekerjaan Umum Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	0.6	Triwulan IV	0.6

Keterangan Tambahan:

1. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2023*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Lintas Sektor*

1.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KRITERIA Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2023

(tabel ini dapat di buat landscape)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RENSTRA
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur	<p>Indikator: Persentase Ketersediaan Infrastruktur</p> <p>Formula Perhitungan :</p> $((\text{Persentase kemandapan jalan}/14) + (\text{Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak}/14) + (\text{Persentase rumah tangga yang besanitasi}/14) + (\text{Persentasi Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi}/14) + (\text{Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani}/14) + (\text{Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU}/14) + (\text{Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara}/14) + (\text{Persentase Kebutuhan Bangunan Pantai yang terpenuhi}/14) + (\text{Persentase Kebutuhan Tanggul Sungai yang terpenuhi}/14) + (\text{Persentase Kebutuhan Polder/Kolam Retensi yang Terpenuhi}/14) + (\text{Persentase Pemenuhan Kebutuhan air baku}/14) + (\text{Rasio Jaringan Irigasi}/14) + (\text{Rasio Ketersediaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi}/14) + (\text{Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah}/14)$	%	-	-	18.93	19.89	105.05		54.01

		Realisasi = 19.89 % $\frac{((92.86/14)+(0/14)+(3.55/14)+(0/14)+(2.05/14)+(25/14)+(64.71/14)+(0/14)+(0/14)+(66.67/14)+(0/14)-(0/14)+(23.59/14)+(0/14))}{100}$								
2.	Meningkatnya kualitas dan pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang	<u>Indikator:</u> Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang <u>Formula Perhitungan :</u> $IP = ((A/B)+(C/D))/2$ A : Struktur Ruang Termanfaatkan B : Rencana Struktur Ruang C : Pola Ruang Termanfaatkan D : Rencana Pola Ruang	%	-	-	0.6	0.6	100%		0.75

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur

Kinerja sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur diukur dengan indikator persentase ketersediaan infrastruktur. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur	Persentase ketersediaan infrastruktur	$\frac{((\text{Persentase kemandapan jalan}/14) + (\text{Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak}/14) + (\text{Persentase rumah tangga yang besanitasi}/14) + (\text{Persentasi Pengembangan})}{4}$

			perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi/14) + (Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani/14) + (Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU/14) + (Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara/14) + (Persentase Kebutuhan Bangunan Pantai yang terpenuhi/14) + (Persentase Kebutuhan Tanggul Sungai yang terpenuhi/14) + (Persentase Kebutuhan Polder/Kolam Retensi yang Terpenuhi/14) + (Persentase Pemenuhan Kebutuhan air baku/14) + (Rasio Jaringan Irigasi/14) + (Rasio Ketersediaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi/14) + (Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah/14))
--	--	--	--

Kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan ((Persentase kemantapan jalan/14) + (Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak/14) + (Persentase rumah tangga yang besanitasi/14) + (Persentasi Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi/14) + (Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani/14) + (Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU/14) + (Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara/14) + (Persentase Kebutuhan Bangunan Pantai yang terpenuhi/14) + (Persentase Kebutuhan Tanggul Sungai yang terpenuhi/14) + (Persentase Kebutuhan Polder/Kolam Retensi yang

Terpenuhi/14) + (Persentase Pemenuhan Kebutuhan air baku/14) + (Rasio Jaringan Irigasi/14) + (Rasio Ketersediaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi/14) + (Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah/14)). Tahun 2023 capaian kinerja sasaran ini adalah 19.89% atau sebesar 105,05% dari target 18.93%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur

Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas dan pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang diukur dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	$IP = ((A/B)+(C/D))/2$ A : Struktur Ruang Termanfaatkan B : Rencana Struktur Ruang C : Pola Ruang Termanfaatkan D : Rencana Pola Ruang

Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas dan pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan $IP = ((A/B)+(C/D))/2$ pada Tahun 2023 capaian kinerja indikator sasaran ini adalah 0.6 atau sebesar 100% dari target 0.6. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023*(tabel ini dapat di buat landscape)*

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase ketersediaan infrastruktur	-	18.93	19.89	105.05	54.01	36.82
2.	Meningkatnya kualitas dan pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang	-	0.6	0.6	100	0.75	80

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur adalah sebagai berikut:

- Tercapai 19.89 % (kolom 5), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 105.05 % (kolom 6) (terlampaui/~~belum melampaui~~).
- Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai/~~tidak tercapai~~

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan sasaran kinerja program Menurunkan luas kawasan yang terdampak daya rusak air di WS Kewenangan Provinsi dan meningkatkan luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan system irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan dikelola mempunyai Indikator kinerja Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air formula perhitungan indikator ini adalah ((Persentase Pembangunan Seawall dan bangunan)+(Persentase Pembangunan Tanggul Sungai)+(Persentase Pembangunan Polder/Kolam Retensi)+(Persentase Pembangunan

Embung atau Penampung Air lainnya/5)+(Persentase pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi)/5)x 100%) Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 21.20 dari target 26.07 % atau sebesar 81.33%.

2. Program Penyelenggaraan Jalan dengan sasaran program meningkatnya persentase kemantapan jalan mempunyai Indikator persentase kemantapan jalan formula perhitungan indikator ini adalah Panjang jalan provinsi kondisi mantap (km) dibagi total panjang jalan provinsi (km) dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah 92.86% dari target sebesar 90.13%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2022 yang sebesar 91.67%.
3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan sasaran kinerja program meningkatkan tenaga ahli yang terlatih, meningkatkan tingkat kepuasan layanan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi dan tersedianya kebijakan khusus terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi mempunyai Indikator kinerja rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi formula perhitungan indikator ini adalah A(tenaga ahli x 60%) + B (Sipjaki x 30%) + C (kebijakan khusus x 10%) .Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 23.59 % dari target 15.92 % atau sebesar diatas 100%.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan sasaran kinerja program terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah mempunyai indikator kinerja persentase rumah tangga yang bersanitasi formula perhitungan indikator ini adalah (jumlah rumah tangga yang bersanitasi dibagi jumlah total rumah tangga yang membutuhkan akses sanitasi) x 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 3.55% dari target 6% atau sebesar 59 %.
5. Program Kawasan Permukiman dengan sasaran kinerja meningkatnya kualitas Kawasan permukiman mempunyai indikator kinerja persentase luas Kawasan kumuh yang tertangani formula perhitungan indikator ini adalah ((Luas kawasan kumuh yang

tertangani dibagi luas kawasan kumuh provinsi) x 100%). Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 2.05% dari target 6% atau sebesar 34,1 %.

6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan sasaran kinerja terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum mempunyai indikator kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM lintas Kab/Kota} / \text{Jumlah Rumah tangga yang berada di wilayah lintas Kab/Kota yang ditetapkan}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 0% dari target 0% atau sebesar 0 %. Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2023 terkait Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota belum direalisasikan dikarenakan belum lengkapnya readiness criteria (RC).

7. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan sasaran kinerja terselenggaranya pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional mempunyai indikator kinerja Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah} / \text{Jumlah Rumah tangga yang berada di wilayah lintas Kab/Kota yang ditetapkan}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 0% dari target 0% atau sebesar 0 %. Faktor

penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Belum diterbitkannya Raperda dari Dinas LHK perihal pengelolaan persampahan regional dan lokasi khusus TPST Regional untuk ditetapkan di DPRD.
- Belum adanya MoU antara Kepala Daerah (Gubernur dan Kab/Kota) perihal kesepakatan lokasi Pembangunan TPST Regional dan pembagian beban pengelolaan persampahan untuk masing-masing Kepala Daerah.
- Keterbatasan anggaran untuk Pembangunan sarana dan prasarana TPST Regional.

8. Program Peningkatan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan sasaran kinerja terselenggaranya peningkatan prasarana , sarana dan utilitas umum (PSU) mempunyai indikator kinerja Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah perumahan yang terfasilitasi} / \text{Total perumahan}) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 25% dari target 25 % atau sebesar 100 %.

9. Program Pengembangan Perumahan dengan sasaran terselenggaranya pengembangan perumahan mempunyai indikator kinerja persentase pengembangan perumahan korban bencana atau relokasi program provinsi formula perhitungan indikator ini adalah $((\text{Jumlah Rumah korban Bencana atau relokasi program provinsi yang ditangani} / \text{Jumlah Rumah Korban Bencana atau Program Provinsi yang teridentifikasi}) \times 100\%)$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 0% dari target 25 % atau sebesar 0 %. Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Indikator belum mengakomodir jika tidak terjadi bencana
- Belum adanya kebutuhan relokasi karena program provinsi

10. Program Penataan Bangunan Gedung dengan sasaran terselenggaranya penataan bangunan gedung mempunyai indikator kinerja persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah}$

bangunan gedung yang diselenggarakan dibagi Jumlah bangunan gedung yang direncanakan) x 100%). Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 64.71% dari target 23.53 % atau sebesar lebih dari 100 %

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya kualitas dan pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 0.6 ,dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100 % (kolom 7) (tercapai/~~tidak tercapai~~*).
- b. Dikarenakan pada tahun 2022 belum adanya indikator sasaran meningkatnya kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang maka target dan realisasi pada tahun 2022 tidak ada.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja 0.75 tercapai 80 %

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut (siapkan PK Kepala Perangkat Daerah):

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan sasaran kinerja program Terselenggaranya Kegiatan Penataan Ruang mempunyai Indikator kinerja Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Pemanfaatan Ruang formula perhitungan indikator ini adalah Kesesuaian Rencana tata Ruang dibagi Realisasi Pemanfaatan ruang dikali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 85 % dari target 85 % atau sebesar 100 %.
2. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan sasaran program Terselenggaranya Kegiatan Pertanahan mempunyai Indikator Presentase program pengadaan tanah untuk Kepentingan umum formula perhitungan indikator ini adalah Luasan Pengadaan Tanah dibagi Luasan Kebutuhan Tanah untuk Kepentingan Umum dikali 100%. Capaian indikator kinerja

adalah 33.33 % dari target sebesar 20%.



3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan sasaran program Terselenggaranya Kegiatan Pertanahan mempunyai Indikator Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah kasus yang terselesaikan dibagi jumlah kasus yang diinventarisasi dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah 14.29 % dari target sebesar 15%.
4. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan sasaran program Terselenggaranya Kegiatan Pertanahan mempunyai Indikator Presentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah ganti rugi dan santunan Tanah yang terselesaikan dibagi Jumlah Daftar Penerima Ganti Rugi dan Santunan Tanah dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah 25% dari target sebesar 80%.

Tabel III.5. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Formula Perhitungan : $\left(\frac{\text{Persentase kemantapan jalan}}{14} \right) + \left(\frac{\text{Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak}}{14} \right) + \left(\frac{\text{Persentase rumah tangga yang besanitasi}}{14} \right) + \left(\frac{\text{Persentasi Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi}}{14} \right) + \left(\frac{\text{Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani}}{14} \right) + \left(\frac{\text{Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU}}{14} \right) + \left(\frac{\text{Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara}}{14} \right) + \left(\frac{\text{Persentase Kebutuhan Bangunan Pantai yang}}{14} \right)$	18.93 %	19.89 %	105.05 %

	<p>terpenuhi/14) + (Persentase Kebutuhan Tanggul Sungai yang terpenuhi/14) + (Persentase Kebutuhan Polder/Kolam Retensi yang Terpenuhi/14) + (Persentase Pemenuhan Kebutuhan air baku/14) + (Rasio Jaringan Irigasi/14) + (Rasio Ketersediaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi/14) + (Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah/14))</p> <p>Realisasi = 19.89 % $((92.86/14)+(0/14)+(3.55/14)+(0/14)+(2.05/14)+(25/14)+(64.71/14)+(0/14)+(0/14)+(66.67/14)+(0/14)+(0/14)+(23.59/14)+(0/14))$</p>			
2.	<p>Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> $IP = ((A/B)+(C/D))/2$ <p>A : Struktur Ruang Termanfaatkan B : Rencana Struktur Ruang C : Pola Ruang Termanfaatkan D : Rencana Pola Ruang</p>	0.6	0.6	100 %

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Pekerjaan Cubluk di Provinsi Babel</p>
2.		<p>DAK Bidang Jalan TA. 2023</p>

3		RTLH TA. 2023
4		Long Segment Ruas Jalan Simpat Empat (Sijuk) – Buding Dukung Geosite Bukit Penyamun

Faktor Pendukung keberhasilan

- Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampumengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan.
- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
- Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun APBN.
- Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Ada beberapa paket pekerjaan yang dibatalkan pelaksanaannya karena alasan teknis tertentu.
- b. Adanya paket pekerjaan yang memerlukan waktu lebih untuk proses lelang yang selektif sehingga pada triwulan III masih dalam tahap proses administrasi paket kegiatan.
- c. Sebagian paket pekerjaan masih dalam tahap on-process dan menunggu Keputusan Anggaran Perubahan Tahun 2023.

1.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:



Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	18.93 %	19.89 %	105.05%	354.459.588.075	345.814.848.825	97,56%	8.644.739.250
2	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.6	0.6	100 %	2.125.860.200	1.873.443.200	88.12 %	252.416.999
						37.096.481.138	34.844.332.257	93.93 %	2.252.148.881
Total Belanja						393.681.929.413	382.532.624.283	97.16 %	11.149.305.130

Sumber: *http:SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2023, Laporan Keuangan DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023*

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2023 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 393.681.929.413 terealisasi Rp 382.532.624.283 atau 97.16 % sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 11.149.305.130 yang bersumber dari:

- Ada beberapa paket pekerjaan yang dibatalkan pelaksanaannya karena alasan teknis tertentu.
- Adanya paket pekerjaan yang memerlukan waktu lebih untuk proses lelang yang selektif sehingga pada triwulan III masih dalam tahap proses administrasi paket kegiatan.
- Sebagian paket pekerjaan masih dalam tahap on-process dan menunggu Keputusan Anggaran Perubahan Tahun 2023.
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi biaya makanan dan minuman.


1.3 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.

1.4 Penghargaan

Sepanjang Tahun 2023 DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

1. Provinsi Terbaik Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi TA.2022
- 

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

BAB 4

Penutup

Hasil laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Faktor perubahan anggaran TA 2023 pada akhir tahun membuat beberapa paket Pekerjaan dikerjakan dengan Waktu yang minim akan tetapi realisasi/capaian yang diperoleh mencapai 100%

Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah:

1. Komitmen yang kuat seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Koordinasi internal yang berjalan dengan baik. Koordinasi internal Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara berkala dan dikemas dalam acara *Coffee Morning*.
3. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemetrian ATR/BPN, dst terkait tindak lanjut dari meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur dan meningkatnya kualitas dan pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang ;
2. Melakukan koordinasi dalam rangka integrasi dan sinkronisasi kebijakan dan intervensi program, kegiatan dan subkegiatan;
3. Menyiapkan profesionalisme sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Scan Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

**Tujuan dan Sasaran DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	persentase ketersediaan infrastruktur	18.93	32.39	41.80	54.01
2	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.6	0.6	0.7	0.75

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JANTANI ALI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : RIDWAN DJAMALUDDIN
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung



RIDWAN DJAMALUDDIN

Pangkalpinang, Januari 2023

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman



JANTANI ALI
Pembina TK. I
NIP. 231022 200501 1 007

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JANTANI ALI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
PJ. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

Pangkalpinang, 10 November 2023

PIHAK PERTAMA,
KEPALA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN
RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN



JANTANI ALI
Pemula TK. I
NIP. 19731022 200501 1 007

Lampiran 4. Evaluasi LKj PD Tahun 2023



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2022 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjangka dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang didasarkan dengan tujuan evaluasi serta memperimbangan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Informasi yang disampaikan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan nilai sebesar 77,61 dengan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja 'Sangat Baik', yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,50
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,70
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	77,61
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Hasil evaluasi tahun 2022 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih mengikhtisarkan pada implementasi akuntabilitas kinerja pada level perangkat daerah.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG INSPEKTORAT DAERAH

Pangkalpinang, 28 Juni 2023

Nomor : 790/IS /LHE/ITDA/2023
 Sifat : Rahasia
 Lampiran :
 Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022.

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di -
 Pangkalpinang

Berdasarkan surat tugas Inspektur a.n. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 700/4/EVA-ITDA/2023 tanggal 31 Maret 2023 hal melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauhmana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- Memorandem tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja.

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja telah direncanakan dengan baik. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang dalam Renstra, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja serta Rencana Aksi. (LKE terlampir)

b. Pengukuran Kinerja.

Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja diketahui telah terukur dengan baik. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pengukuran kinerja atas realisasi kerjanya namun belum sepenuhnya dilakukan secara berkala. Pengukuran kinerja disusun berdasarkan pedoman, formula perhitungan yang terdapat pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Penghasilan pegawai sudah berbasis aplikasi E-Kinerja. (LKE terlampir)

c. Pelaporan Kinerja.

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja telah dilaksanakan dengan baik. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun laporan kinerja namun masih terdapat hal-hal yang harus mendapat perhatian yaitu belum dilakukan revaluasi berjangka oleh atasan, laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) serta informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan. (LKE terlampir)

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Hasil evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja Internal telah dilaksanakan namun masih terdapat hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- Belum ada Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Internal sesuai dengan standar.
- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- Belum sepenuhnya melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut agar:

- Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala.
- Melakukan revaluasi laporan kinerja.
- Laporan Kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- Informasi dalam laporan kinerja untuk menjadi perhatian utama pimpinan.
- Untuk membuat Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai standar.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Pekerjaan Umum Penadatan Ruang dan Penumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan tindak lanjut rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196306121985031001

Tembusan:

- Mentri PAN dan RB;
- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit Kerja			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
3	PERENCANAAN KINERJA	30,00				
3.1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia.	6,00	A	5,0		50
Kriteria:						
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.				5	50
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja tingkat Provinsi.				5	50
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja tingkat Kabupaten.				5	50
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja tingkat Kecamatan.				5	50
5	Terdapat dokumen perencanaan kinerja yang mendukung kinerja.				5	50
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.				5	50
3.2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yang untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyederhanaan (simplified) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja di tingkat lain (crosscutting).	9,00	B	80		80
Kriteria:						
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformulasikan.				5	50
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.				5	50
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menginformasikan kebutuhan atau kinerja.				5	50
4	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menginformasikan kondisi kinerja.				5	50
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.				5	50
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menginformasikan kondisi kinerja.				5	50
7	Terdapat dokumen perencanaan kinerja yang dapat diukur.				5	50
8	Terdapat dokumen perencanaan kinerja yang menginformasikan hubungan yang.				5	50
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja.				5	50
10	Selanjutnya, bisa memuatkan dan memuatkan Perencanaan Kinerja.				5	50
11	Selanjutnya, bisa memuatkan dan memuatkan Perencanaan Kinerja.				5	50
12	Perencanaan Kinerja telah.	15,00	B	80	32	50
Kriteria:						
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.				5	50
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai.				5	50
3	Tanggal yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dapat diukur.				5	50
4	Rencana awal kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu.				5	50
5	Terdapat perbaikan penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang.				5	50
6	Terdapat perbaikan penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam.				5	50
7	Selanjutnya, bisa memuatkan dan memuatkan Perencanaan Kinerja.				5	50
8	Selanjutnya, bisa memuatkan dan memuatkan Perencanaan Kinerja.				5	50

2	PENGUKURAN KINERJA	30,00				
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	B	80		80
Kriteria:						
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.				5	50
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur.				5	50
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.				5	50
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi	9,00	B	80		80
Kriteria:						
1	Informasi telah terdapat sebagai pengantar keputusan (Decision Maker) dalam.				5	50
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja.				5	50
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang.				5	50
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.				5	50
5	Selanjutnya, bisa memuatkan dan memuatkan Perencanaan Kinerja.				5	50
6	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memuatkan.				5	50
7	Pengukuran capaian kinerja telah memuatkan (Terdapat Informasi Aplikasi).				5	50
2.3	Pengukuran Kinerja telah ditetapkan	15,00	B	80		80
Kriteria:						
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyusunan.				5	50
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyusunan/pengawasan.				5	50
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan (Rencana) Organisasi.				5	50
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Strategi dalam mencapai.				5	50
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Kebijakan dalam.				5	50
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Anggaran dalam.				5	50
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Anggaran dalam.				5	50
8	Terdapat informasi atas pengukuran anggaran dalam mencapai kinerja.				5	50
9	Selanjutnya, bisa memuatkan dan memuatkan Perencanaan Kinerja.				5	50
10	Selanjutnya, bisa memuatkan dan memuatkan Perencanaan Kinerja.				5	50
3	PELAPORAN KINERJA	15,00				
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang	3,00	B	80		80
Kriteria:						
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.				5	50
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.				5	50
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformulasikan.				5	50
4	Dokumen Laporan Kinerja telah diformulasikan.				5	50
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.				5	50
6	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.				5	50

3.3	Dokumen Laporan Kinerja telah	4,50	B	80		80
Kriteria:						
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkala sesuai dengan standar.				5	50
2	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan seluruh informasi tentang.				5	50
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja.				5	50
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja.				5	50
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja.				5	50
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja.				5	50
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja.				5	50
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan informasi atas pencapaian sumber.				5	50
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan.				5	50
3.4	Pelaporan Kinerja telah memberikan	7,50	B	80		80
Kriteria:						
1	Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan.				5	50
2	Pengukuran Informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian seluruh pegawai.				5	50
3	Informasi dalam laporan kinerja telah dapat diandalkan dalam penyusunan.				5	50
4	Informasi dalam laporan kinerja telah dapat diandalkan dalam penyusunan.				5	50
5	Informasi dalam laporan kinerja telah dapat diandalkan dalam penyusunan.				5	50
6	Informasi dalam laporan kinerja telah dapat diandalkan dalam penyusunan.				5	50
7	Informasi dalam laporan kinerja telah dapat diandalkan dalam penyusunan.				5	50
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	25,00				
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5,00	B	80		80
Kriteria:						
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.				5	50
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala.				5	50
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendekatan.				5	50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendekatan.				5	50
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendekatan.				5	50
4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	7,50	B	80		80
Kriteria:						
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.				5	50
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendekatan.				5	50
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendekatan.				5	50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendekatan.				5	50
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendekatan.				5	50
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat.	12,50	B	80		80
Kriteria:						
1	Terdapat rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah.				5	50
2	Terdapat rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah.				5	50
3	Terdapat rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah.				5	50
4	Terdapat rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah.				5	50
5	Terdapat rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah.				5	50

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2022**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	-	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	-	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	-	11,70
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	-	17,30
Nilai Akuntabilitas Kinerja			Beban Input	77,81
			AA	BB

No	Catatan
1	Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja telah direncanakan dengan baik. Dinas Kepulauan Bangka Belitung dan Pemukiman Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang teruang dalam Renstra, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja serta Rencana Aksi.
2	Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja dilakukan telah sesuai dengan baik. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pemukiman Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pengukuran kinerja atas realisasi kinerjanya namun belum sepenuhnya dilakukan secara berkala. Pengukuran kinerja disusun berdasarkan pedoman formulasi perhitungan yang terdapat pada indikator Kinerja Utama (KU). Penghasilan pegawai sudah berbasis aplikasi E-Kinerja.
3	Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja telah dilaksanakan dengan baik. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pemukiman Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun laporan kinerja namun masih terdapat hal-hal yang harus mendapat perhatian yaitu belum dilakukan reviu berjenjang oleh atasan, laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja) serta informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan.
4	Hasil evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan namun masih terdapat hal yang perlu mendapat perhatian yaitu: - Belum ada Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Internal sesuai dengan standar. - Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. - Belum sepenuhnya melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

No	Rekomendasi
1	Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala.
2	Melakukan reviu atas laporan kinerja
3	Laporan kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi
4	Informasi dalam laporan kinerja untuk menjadi perhatian utama pimpinan
5	Untuk membuat Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai standar

Lampiran 5. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP PD Tahun 2023

Rekomendasi	Rencana Aksi
Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala	Menerima rekomendasi dari Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan akan melakukan pengukuran kinerja secara berkala pada Tahun 2023 dan untuk Tahun 2022 akan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Melakukan reviu atas laporan kinerja	Menerima rekomendasi dari Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan akan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait reviu atas laporan kinerja
Laporan kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark kinerja)	Menerima rekomendasi dari Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membuat perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark kinerja)
Informasi dalam laporan kinerja untuk menjadi perhatian utama pimpinan	Menerima rekomendasi dari Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadi perhatian utama pimpinan

Rekomendasi	Rencana Aksi
Untuk membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai standar	Menerima rekomendasi dari Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai standar

Lampiran 6. SK IKU DPUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023

Nama Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
Tugas	2. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi
Fungsi	3. 1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang pertanahan, perumahan rakyat, dan Kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi; 2. Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang pertanahan, perumahan rakyat, dan Kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi; 3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman; 4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman; 5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
1	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	$\left(\frac{\text{Persentase kemandirian jalan}}{14} \right) + \left(\frac{\text{Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak}}{14} \right) + \left(\frac{\text{Persentase rumah tangga yang besanitasi}}{14} \right) + \left(\frac{\text{Persentase Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi}}{14} \right) + \left(\frac{\text{Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani}}{14} \right) + \left(\frac{\text{Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU}}{14} \right) + \left(\frac{\text{Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara}}{14} \right) + \left(\frac{\text{Persentase Kebutuhan Bangunan Pantai yang terpenuhi}}{14} \right) + \left(\frac{\text{Persentase Kebutuhan Tanggul Sungai yang terpenuhi}}{14} \right) + \left(\frac{\text{Persentase Kebutuhan Polder/Kolam Retensi yang terpenuhi}}{14} \right) + \left(\frac{\text{Persentase Pemenuhan Kebutuhan air baku}}{14} \right) + \left(\frac{\text{Rasio Jaringan Irigasi}}{14} \right) + \left(\frac{\text{Rasio Ketersediaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi}}{14} \right) + \left(\frac{\text{Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah}}{14} \right)$
2	Meningkatkan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang Serta Perwujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	$IP = \frac{(A+B)+(C+D)}{2}$ A : Struktur Ruang Termantapkan B : Rencana Struktur Ruang C : Pola Ruang Termantapkan D : Rencana Pola Ruang
3	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	Perolehan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas oleh Inspektorat



Lampiran 7. Scan Piagam Penghargaan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023

